

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pendidikan memiliki peranan untuk memberikan lingkungan pembelajaran yang nyaman agar peserta didik dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik guna mengembangkan potensi yang dimiliki, serta mendapatkan wawasan dan kemampuan berpikir (Afandi dan Sajidan, 2017:3). Kualitas suatu pendidikan menjadi standarisasi dalam melahirkan lulusan-lulusan yang memiliki keunggulan kompetitif, nilai daya saing serta kompeten. Khususnya bagi lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK) yang harus memiliki kualifikasi serta keterampilan dibidangnya.

SMK memiliki peranan penting dalam mempersiapkan tenaga kerja yang sesuai dengan permintaan pasar yang terus mengalami perubahan dan perkembangan ke arah yang lebih baik. Sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah RI No 29 Tahun 1990 berkenaan dengan pendidikan menengah yang terdapat pada pasal 3 ayat 2 menjelaskan bahwa SMK memprioritaskan guna mempersiapkan peserta didik untuk memasuki dunia kerja atau lapangan kerja dan dapat melaksanakan pengembangan profesionalitas dalam menjalankan aktivitas kerja. Selanjutnya merujuk pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) NO 20 Tahun 2003 pasal 15 menjelaskan bahwa SMK didefinisikan sebagai suatu lembaga pendidikan menengah yang tujuannya ialah menyiapkan peserta didik yang dibekali dengan keahlian pada bidang kerja tertentu. SMK ini sebagai pendidikan yang memberikan pelatihan dan mendidik sumber daya manusia (SDM) supaya memiliki kebiasaan bekerja guna berkembang dan dapat masuk pada bidang kerja yang mampu menaikkan taraf hidupnya.

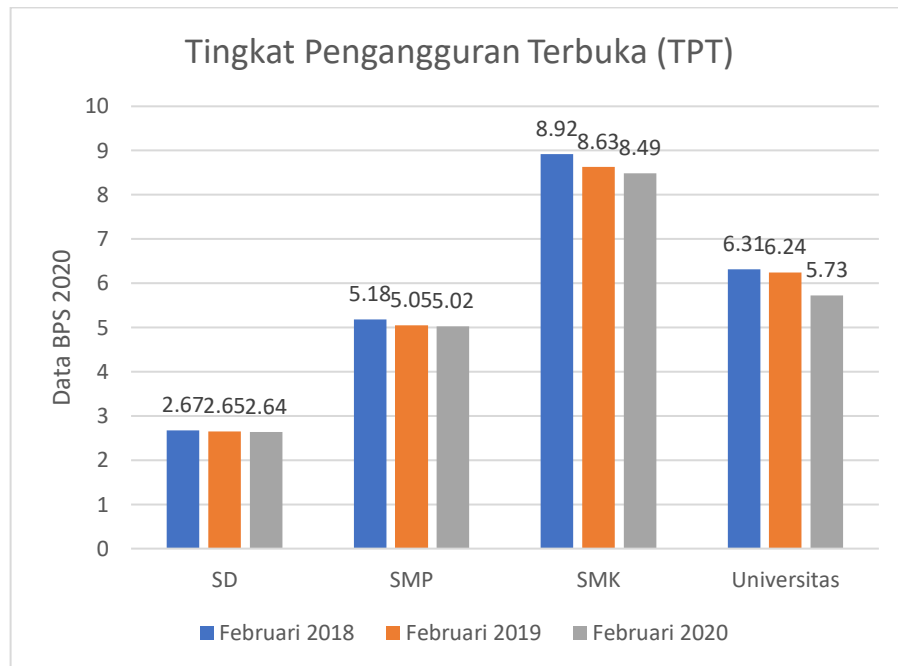
Selain itu, lulusan SMK mampu beradaptasi dengan kemajuan dan perkembangan teknologi serta ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu, pembelajaran yang berlangsung di sekolah, baik bersifat praktik dan teori harus memiliki

keterkaitan dengan Industri, Dunia Kerja (IDUKA) sehingga siap untuk diterapkan (aplikatif) di lapangan (Jatmoko, 2013).

Tuntutan SMK dalam menyiapkan lulusan sebagai tenaga terampil menengah (*middle skilled worker*), didukung oleh berlangsungnya proses pendidikan di sekolah yang mampu mengarahkan dan mengembangkan pada keterampilan peserta didik yang memiliki keunggulan dan kompetensi keahlian pada bidangnya. Atas dasar itu, kurikulum yang ada di SMK harus berkenaan dengan jenis kompetensi keahlian yang dibutuhkan oleh pasar. Sehingga lulusan memiliki kesiapan memasuki dunia kerja melalui bekal keterampilan yang dimiliki. Selain itu juga, diarahkan untuk memiliki kemampuan membuka lapangan kerja sendiri (wairausaha) (Indriaturrahi dan Sudiyanto, 2016).

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, bahwa dalam melaksanakan persiapan peserta didik yang memiliki kesiapan dan kompetensi untuk memasuki dunia kerja ialah dengan dibekali kompetensi yang didasarkan pada kebutuhan IDUKA. Dengan demikian, sekolah diharuskan memiliki keterkaitan yang kuat dalam melaksanakan perencanaan kurikulum, evaluasi pembelajaran, sarana prasarana yang mendukung, dan juga proses pembelajaran berbasis industri di sekolah. Pada akhirnya, kompetensi keahlian yang dimiliki peserta didik, memang berdasarkan pada kebutuhan dan ketentuan yang sesuai dengan IDUKA.

Namun kondisi saat ini memperlihatkan bahwa ada *gap* atau kesenjangan antara kebutuhan lulusan (tenaga kerja) di industri dengan lulusan yang dihasilkan oleh sekolah. Hal ini dapat dilihat berdasarkan data tingkat pengangguran lulusan SMK pada gambar berikut;



**Gambar 1.1 Tingkat Pengangguran Terbuka
(Sumber; Badan Pusat Statistik, 2020)**

Berdasarkan gambar 1.1 tingkatan dari pendidikan yang berlangsung pada bulan Februari 2020, TPT terhadap SMK masih yang paling tinggi dibandingkan pada tingkatan pendidikan yang lainnya, yakni senilai 8,49 persen. Merujuk pada data dari Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan bahwa tingkatan dari pengangguran terbuka (TPT) pada bulan Februari tahun 2018 pada angka 8,92 terjadi penurunan. Walaupun begitu, jika dilihat dari tingkatan lainnya, lulusan SMK masih berada pada posisi tertinggi.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa SMK belum memenuhi harapan IDUKA secara sepenuhnya. Tidak tercangkupnya lulusan SMK ini tidak semata-mata disebabkan oleh ketidakterseidannya lapangan kerja, namun disebabkan oleh beberapa indikasi yaitu belum semua SMK memiliki kualitas yang sama dalam menghasilkan lulusan yang dibekali dengan kompetensi keahlian sesuai bidangnya serta pengetahuan yang baik (Direktorat Pembinaan SMK, 2019), selain itu kompetensi dari lulusan yang masih rendah, karena dalam proses pembelajaran belum dibekali secara optimal dengan kompetensi yang diharapkan (Perdana, 2019). Menurut Husein (2019) dengan kompetensi

lulusan SMK yang masih rendah, banyak lowongan pekerjaan yang tidak terisi karena calon pekerja (lulusan) belum memenuhi persyaratan kompetensi yang dibutuhkan oleh IDUKA. Hal ini berdampak pada besarnya tingkatan pengangguran lulusan SMK yang masih menunjukkan bahwa kualitas dari pendidikan SMK masih belum optimal (Husein, 2019). Faktor lain adanya kesenjangan ini didorong oleh beberapa permasalahan yaitu fasilitas sekolah yang kurang memadai, sehingga peserta didik belum mampu mengembangkan keterampilannya secara optimal (Rahdiyanta, 2019), serta masih terjadinya ketidakcocokan antara yang sedang dipelajari di sekolah dengan realita prakteknya di IDUKA.

Perkembangan kompetensi SMK yang masih rendah ini, diutarakan juga oleh Setiyo (2018) bahwa sekarang tenaga kerja atau SDM masih belum mampu menaikkan mutu lulusan yang berdaya saing tinggi. Disebabkan proses pembelajaran yang terjadi di sekolah belum cukup sesuai dengan kebutuhan IDUKA, hal ini mengakibatkan lulusan SMK tidak siap untuk memasuki dunia kerja (Perdana, 2018). Dengan demikian dibutuhkan peningkatan revitalisasi, kualitas dan juga relevansi dari pendidikan SMK dalam menghasilkan lulusan yang berkualitas. Permasalahan ini menyebabkan, kebutuhan akan tenaga kerja terampil, kreatif serta inovatif belum mampu terpenuhi secara optimal dalam merespon perkembangan kebutuhan pasar (Dirjen Pendidikan Vokasi, 2020).

Kondisi ini sebenarnya telah direspon oleh pemerintah melalui Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2016 berkenaan dengan pembaharuan SMK dalam upaya menghasilkan SDM yang memiliki daya saing melalui program revitalisasi. Salah satu revitalisasi yang dilakukan adalah menyesuaikan kurikulum dan bermitra baik dengan IDUKA guna melaksanakan pengembangan pendidikan SMK yang sejalan dengan kompetensi yang diperlukan oleh lulusan yang dihasilkan. Supaya kurikulum yang diterapkan oleh SMK sejalan dan selaras dengan yang dibutuhkan oleh pihak IDUKA, dengan demikian diperlukan alur guna menyeleraskan kurikulum yang ada. Di bawah ini gambar skema penyelarasan kurikulum sekolah dengan IDUKA;



Gambar 1.2 Penyelarasan Kurikulum

(Sumber; Kemdikbud,2017)

Penyelarasan kurikulum dengan IDUKA dimaksudkan untuk mencetak lulusan yang bermutu yang mampu melaksanakan pemenuhan terhadap persyaratan dan kualifikasi yang diperlukan oleh IDUKA. Yang mana SMK memiliki perbedaan dengan sekolah umum, terutama pada kompetensi keahlian yang harus dimiliki oleh lulusan berkaitan secara langsung dengan IDUKA, hal ini yang menyebabkan kurikulum SMK tidak bisa dipisahkan dari kondisi dan perkembangan IDUKA (Sunarto dan Supriadi, 2019). Kegiatan ini diperlukan kemitraan yang dijalin antara SMK dengan IDUKA, karena memiliki kepentingan pada relevansi pendidikan dengan IDUKA agar dapat menghasilkan lulusan yang unggul sesuai dengan kebutuhan industri. Kemitraan ini membantu sekolah dalam proses merancang pola pembelajaran mengacu pada kebutuhan pasar akan tenaga kerja yang dibutuhkan, sehingga peserta didik mampu dibekali dengan keterampilan *hard skill* dan juga *soft skill* yang bagus, dapat menaikkan proses dari mutu pembelajaran, terlebih untuk bidang praktik.

Kemitraan yang dijalin antara SMK dengan IDUKA menurut Wayong (2010) merupakan kunci pokok keberhasilan pendidikan sistem ganda (PSG) pada SMK, dimana proses pelaksanaannya dirancang, dilakukan serta dilakukan evaluasi secara bersama, sehingga pada akhirnya kesesuaian

kompetensi lulusan terhadap tuntutan IDUKA meningkat. Lebih lanjut, Sajidan et al (2018) menyampaikan bahwa kemitraan ini memiliki peranan yang strategis dalam menghasilkan lulusan yang dapat bersaing dalam persaingan global dan juga produktif. Tahapannya dalam melaksanakan penilaian pembelajaran, penyesuaian kurikulum dan proses yang ada di SMK bisa dilaksanakan dengan cara pemantapan dan penyempurnaan model yang menyesuaikan dengan permintaan yang ada (*demand-driven*), merubah model dari yang memberikan penawaran (*supply-driven*) yang terjadi sekarang dengan standarisasi. Karakteristik dari SMK ialah memprioritaskan pendekatan pembelajaran yang berbasis dengan pekerjaan (*job-based learning*).

Kemitraan antara SMK dengan IDUKA ini sudah mendapat dukungan dari pemerintah, salah satunya adalah diterbitkannya Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan Berbasis Kompetensi yang *Link and Match* dengan Industri. Peraturan ini menjadi pedoman bagi IDUKA, untuk memfasilitasi pembinaan kepada SMK dalam menghasilkan lulusan sebagai tenaga kerja yang berkompeten, yang mana peranannya adalah memberikan masukan guna sinkronisasi kurikulum, memberikan ruang untuk peserta didik dan guru praktik atau magang di IDUKA sesuai dengan program keahlian, memberikan instruktur sebagai pembimbing praktik guru dan peserta didik, memberikan bantuan alat praktik serta mengeluarkan sertifikat bagi guru dan peserta didik.

Sinergi yang dibangun antara SMK dan IDUKA sangat diperlukan terlebih dalam upaya menyesuaikan dengan kemajuan dan perkembangan industri sehingga terciptanya lingkungan yang kolaboratif dalam menghasilkan lulusan yang memiliki keterampilan (Direjen Pendidikan Vokasi, 2020). Berdasarkan data data pokok pendidikan (dapodik) bahwa beberapa SMK telah melakukan kemitraan dengan IDUKA melalui berbagai program sebagai berikut;



Gambar 1.3 Data Rekap Kemitraan SMK dan IDUKA

(Sumber: Dirjen Pendidikan Vokasi, 2020)

Berdasarkan data temuan lainnya yang didapatkan dari studi pendahuluan bahwa, kemitraan antara SMK Negeri di kota Bogor dengan IDUKA telah dilaksanakan. Kemitraan yang terjalin bukan hanya sebatas di atas hitam putih saja, namun memiliki kesamaan dalam kesepahaman, tujuan yang sama, dan saling membahu dalam menyusun program-program kemitraan, sehingga sekolah dapat menghasilkan lulusan-lulusan yang berkualitas dan dapat terserap di berbagai bidang industri sesuai dengan kompetensi keahliannya. Dalam bermitra, tentunya didukung dengan adanya kemampuan kepala sekolah dan tim dalam menjaga dan memelihara hubungan yang baik dengan IDUKA serta berorientasi pada pemberian kepercayaan satu sama lain, yang pada akhirnya akan terbentuk kemitraan yang berkelanjutan dan memberikan keuntungan bagi sekolah dan IDUKA.

Kemitraan yang dilaksanakan dengan IDUKA memberikan manfaat yang penting bagi sekolah, salah satunya adalah dapat memberikan kekuatan bagi pendidikan di SMK dalam menjalankan proses pembelajaran yang berorientasi pada praktik atau sesuai dengan apa yang terjadi di industri. Artinya adanya kesesuaian antara apa yang dipelajari di sekolah dengan yang diharapkan oleh IDUKA. Hal ini dilakukan melalui rancangan kurikulum bersama. Dalam konteks yang berkenaan dengan memberi bekal pada lulusan ialah mempersiapkan peserta didik agar masuk pada bursa ketenagakerjaan, yakni berbagai indikator dari kompetensi yang wajib mendapatkan perhatian dari pihak kepala sekolah, diantaranya ialah: 1) melek terhadap era digitalisasi

(*digital age literacy*), 2) hubungan komunikasi yang efektif (*effective communication*), 3) memiliki kemampuan untuk berpikir yang sifatnya inventif (*inventive thinking*), dan 4) produktifitas yang baik (*high productivity*) (Afandi dan Sajidan, 2017).

Selain revitalisasi SMK sebagai upaya mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh SMK khususnya dalam peningkatan kualitas SDM yang unggul, pemerintah juga merespon melalui program yang dicetuskan oleh Menteri Pendidikan yaitu konsep kebijakan merdeka belajar yang befokus pada peningkatan penciptaan SDM yang berkualitas dan kompetitif. Sasaran merdeka belajar adalah sekolah, kepala sekolah, guru dan peserta didik yang menjadi satu ekosistem utuh dalam membuat program yang inovatif di sekolah (Arbaa, 2020). Kebijakan ini sebagai bentuk pemenuhan aspek dan akses pendidikan di SMK yang berupa kompetensi keahlian kepala sekolah dan pendidik yang professional sehingga mampu menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing, dengan adanya keleluasaan untuk mengembangkan kompetensi peserta didik melalui proses pembelajaran yang dirancang bersama (Priatmoko dan Dzakiyyah, 2020).

Dalam menyikapi kebijakan merdeka belajar, tidak dapat dipungkiri bahwa peran kepala sekolah sangat penting, terutama mengenai konsep kemandirian sekolah karena memiliki tugas sebagai pemimpin sekaligus *manager*. Kepala sekolah dituntut memiliki pengetahuan dan pemahaman yang amat baik mengenai poin penting dari kebijakan merdeka belajar karena berkaitan erat dengan keputusan yang akan diambil oleh kepala sekolah sebagai seorang *leader* dalam mewujudkan kebijakan merdeka belajar di sekolah. Selanjutnya, sebagai seorang pengelola, kepala sekolah harus mampu mengelola dan mendayagunakan segala sumber daya sekolah untuk melaksanakan pembinaan kepada guru dalam mendukung merealisasikan kebijakan tersebut (Khurniawan dan Erda, 2019).

Kebijakan merdeka belajar memberikan kesempatan dan peluang bagi sekolah guna mengoptimalkan potensi peserta didik, serta dibutuhkan

komitmen yang kuat dari kepala sekolah, guru, peserta didik, komite sekolah, IDUKA dalam mengoptimalkan segala bentuk kegiatan belajar di sekolah yang sesuai dengan konsep kebijakan merdeka belajar. Kebijakan ini, memberikan peluang pada kepala sekolah dalam memikirkan bagaimana proses pendidikan yang baik, menarik, merumuskan solusi terbaik guna menyelesaikan permasalahan yang muncul terutama mengenai kesenjangan antara SMK dengan IDUKA, serta mempersiapkan lulusan yang sesuai dengan yang diharapkan dan sesuai dengan klasifikasi IDUKA baik dari segi *attitude*, wawasan, kompetensi keahlian yang mampu menjadi pendorong bagi pengembangan mutu SMK melalui pembelajaran yang menyenangkan, mandiri yang berpusat pada kompetensi peserta didik. Tetapi, yang terjadi di lapangan masih terdapat beberapa kepala sekolah yang belum siap (Hendri, 2020). Hal ini senada berdasarkan temuan yang diperoleh melalui hasil studi pendahuluan yang dilakukan peneliti melalui proses wawancara dengan beberapa kepala sekolah dan guru di SMK Negeri Kota Bogor bahwa saat ini, belum semua SMK yang menerapkan kebijakan merdeka belajar secara optimal karena belum adanya sosialisasi secara betul mengenai kebijakan ini, sehingga berdampak pada pemahaman kepala sekolah dan guru yang kurang. Di sisi lain, masih ada sebagian kepala sekolah SMK yang belum mempunyai strategi tepat dalam menetapkan inovasi yang baru sebagai pemecahan masalah yang berkenaan dengan lulusan yang dihasilkan oleh SMK yang dapat menjalani persaingan pada pasar kerja. Yang mana seharusnya, kepala sekolah memiliki kemampuan dalam mengelola dan memimpin kegiatan di sekolah.

Kepala sekolah dituntut agar menyiapkan lulusan SMK yang siap memasuki dunia kerja serta mempunyai keterampilan dibidangnya melalui program kemitraan yang dirancang dan melibatkan industri untuk memperhatikan tuntutan kebutuhan dunia kerja (*demand driven*). Seperti yang termaktub pada Pasal ayat 1 PP 28 Tahun 1990 bahwa menyebutkan bahwa pihak kepala sekolah memiliki tanggung jawab guna menyelenggarakan

pemeliharaan dan pendayagunaan prasarana ataupun sarana, pembinaan tenaga kependidikan administrasi sekolah, dan juga kegiatan pendidikan.

Merujuk pada uraian Murwantini (2017) dan Khurniawan (2019) bahwa kepala sekolah perlu memiliki kemampuan dalam mengenali elemen perubahan dengan sikap terbuka, mengembangkan pengetahuan serta keahlian yang dimiliki untuk dapat mengelola perubahan yang terjadi khususnya kebutuhan akan tenaga kerja, sehingga membawa sekolah untuk ke arah yang lebih baik.

Kepemimpinan kepala sekolah sangat berperan dalam menetapkan kualifikasi kerja sesuai standar IDUKA. Hal ini akan terwujud apabila peran kepala sekolah dalam proses pendidikan di SMK yang mempunyai keterkaitan hubungan atau kemitraan yang bagus terhadap pihak IDUKA. Selanjutnya Murwantini (2017) menyampaikan bahwa kepala sekolah SMK harus memiliki peran sebagai 1) pemberi keyakinan kepada anggota untuk siap menghadapi perubahan IDUKA yang dinamis dan kebijakan pendidikan, 2) pemberi solusi akan perubahan yang terjadi dan berpengaruh terhadap kemajuan sekolah, dan 3) pemberi bantuan guna mensukseskan kegiatan kemitraan yang berlangsung.

Kemampuan kepala sekolah dalam mengenali elemen perubahan IDUKA yang berpengaruh terhadap kualitas lulusan sangat diperlukan bagi kepemimpinan kepala sekolah khususnya SMK. Kepala sekolah harus terbuka dan mampu meningkatkan pengetahuan serta keterampilan agar mampu mengelola perubahan IDUKA yang terus berubah (Murwanti, 2017), yang mana dalam kebijakan merdeka belajar kepala sekolah sebagai penggerak perubahan di sekolah. Atas dasar tersebut, kepala sekolah harus membuat program-program kerja melalui kegiatan yang ada di SMK yang mampu menyediakan kesempatan dan juga tantangan guna mengembangkan pengetahuan, kemandirian, kebutuhan, kepribadian, kapasitas, dan juga kreativitas dengan dinamika dan kenyataan lapangan.

Berdasarkan uraian tersebut, menurut Mendikbud (2020) bahwa kepala sekolah dituntut untuk menjadi seperti *Chief Executive Officer* (CEO) perusahaan, yang mana harus mampu mengatur sekolah guna mencari dan

mengembangkan kesempatan peluang kemitraan dengan IDUKA. selain itu, kepala sekolah juga harus memiliki keinginan dalam berlatih dan meningkatkan kompetensi keahliannya guna terus relevan dengan keahlian yang menjadi standarisasi kualifikasi IDUKA. Atas dasar itulah, menjadi suatu kepentingan dan keharusan kepala sekolah yang adaptif akan perubahan IDUKA yang terus berkembang pada kemajuan (Jannah, 2020). Keharusan ini sebagai upaya agar SMK mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan beradaptasi di masyarakat dan mandiri (Supriatna, 2018). Dari data studi pendahuluan lainnya bahwa dalam praktiknya belum optimalnya kesiapan dan kompetensi keahlian yang dimiliki oleh kepala sekolah yang mendukung dan memiliki keberanian penuh guna melakukan suatu terobosan baru untuk menciptakan inovasi bagi kemajuan sekolah.

Dengan peran kepemimpinan kepala sekolah dalam melaksanakan hubungan kemitraan yang baik dengan proses pembelajaran yang berorientasi pada keterampilan peserta didik, sejalan dengan konsep kebijakan merdeka belajar yang mana peserta didik sebagai calon tenaga kerja memiliki peluang guna mengembangkan dan menyalurkan *passionnya* melalui proses pembelajaran yang didapatkan di sekolah dengan adanya pembelajaran yang berbasis industri atau mendapatkan pengalaman di luar sekolah (Yamin dan Syarif, 2019). Keselarasan dan keberhasilan ini diharapkan dapat menjadi jawaban atas tuntutan tantangan SMK dalam mencetak lulusan tepat terhadap tuntutan dari IDUKA. Sehingga pendidikan di SMK semakin mumpuni, mampu menghasilkan lulusan-lulusan yang berdaya saing dan menjadi kekuatan tersendiri bagi sekolah.

Aspek yang wajib mendapatkan perhatian sebagai usaha untuk meningkatkan mutu proses dan juga penilaian pembelajaran untuk SMK ialah faktor yang mendorong dalam melaksanakan penyelaran kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran dan juga kemitraan dengan pihak IDUKA.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti mengasumsikan bahwa sekolah diharuskan mampu menjalin hubungan yang baik dengan IDUKA yang berawal dari proses merencanakan program yang dapat meningkatkan kualitas sampai dengan penerapan evaluasi program. Tanpa terjalinnya hubungan yang baik dengan IDUKA, maka sekolah akan menghadapi kesulitan dalam mengimplementasikan pengelolaan pendidikan yang berkualitas. Kemitraan yang terjalin dengan IDUKA mampu mengoptimalisasikan penyediaan SDM atau lulusan serta pemenuhan fasilitas yang mendukung sesuai dengan konsep merdeka belajar. Kemitraan ini memiliki dampak yang baik untuk kedua belah pihak yaitu sekolah dan IDUKA, serta proses dari pelaksanaan pembelajaran menjadi relevan terhadap tantangan dan juga tuntutan IDUKA yang berlangsung dengan baik, serta menjadikan lulusan lebih kompeten (Azizah, Murniati dan Khairuddin, 2015).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian berkenaan dengan latar belakang yang disajikan tersebut di atas, dengan demikian dihasilkan perumusan permasalahan penelitian yang berbentuk pertanyaan-pertanyaan penelitian. Pertanyaan-pertanyaan penelitian tersebut dirancang guna menghasilkan informasi dan juga data yang berkenaan dengan fokus dari permasalahan penelitian. Permasalahan penelitian yang peneliti fokuskan ialah pada permasalahan-permasalahan yang mencangkup: bagaimanakah kemitraan yang berlangsung antara pihak sekolah dengan pihak Industri dan Dunia Kerja (IDUKA) berlandaskan kebijakan merdeka belajar yang diciptakan oleh kepala sekolah? Fokus masalah itu, peneliti lebih memperincikannya pada pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagaimana di bawah ini:

1. Bagaimana pelaksanaan kepemimpinan kepala sekolah dalam menciptakan kemitraan dengan Industri dan Dunia Kerja (IDUKA) berlandaskan kebijakan merdeka belajar di SMKN Kota Bogor?
Meliputi:

- a. Seperti apakah kepala sekolah dalam membuat perencanaan kemitraan dengan Industri dan Dunia Kerja (IDUKA) berlandaskan kebijakan merdeka belajar?
 - b. Bagaimana kepala sekolah mengelola sumber daya manusia (SDM) dalam mendukung terciptanya kemitraan dengan Industri dan Dunia Kerja (IDUKA) berlandaskan kebijakan merdeka belajar?
 - c. Bagaimana kepala sekolah membuat keputusan dalam menciptakan kemitraan dengan Industri dan Dunia Kerja (IDUKA) berlandaskan kebijakan merdeka belajar?
 - d. Bagaimana kemampuan kepala sekolah dalam membangun kemitraan dengan Industri dan Dunia Kerja (IDUKA) berlandaskan kebijakan merdeka belajar?
2. Mendeskripsikan secara komprehensif kemitraan dengan Industri dan Dunia Kerja (IDUKA) berlandaskan kebijakan merdeka belajar yang dilakukan oleh kepala sekolah SMKN Kota Bogor, meliputi:
- a. Bagaimana bentuk program kemitraan dengan Industri dan Dunia Kerja (IDUKA) berlandaskan kebijakan merdeka belajar yang telah dilakukan di sekolah?
 - b. Bagaimana proses pelaksanaan kemitraan dengan Industri dan Dunia Kerja (IDUKA) berlandaskan kebijakan merdeka belajar yang telah dilakukan di sekolah?
 - c. Bagaimana kesesuaian (relevansi) kemitraan dengan Industri dan Dunia Kerja (IDUKA) berlandaskan kebijakan merdeka belajar?
 - d. Apa saja yang menjadi faktor keberhasilan dalam menciptakan kemitraan dengan Industri dan Dunia Kerja (IDUKA) berlandaskan kebijakan merdeka belajar di sekolah?
3. Bagaimana model kepemimpinan kepala sekolah dalam menciptakan kemitraan dengan Industri dan Dunia Kerja (IDUKA) berlandaskan kebijakan merdeka belajar di SMKN Kota Bogor?

1.3 Tujuan Penelitian

Kholifatul Husna Asri, 2021

KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH DALAM MENCIPTAKAN KEMITRAAN DENGAN INDUSTRI DAN DUNIA KERJA (IDUKA) BERLANDASKAN KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini ialah agar mendapatkan kebenaran informasi dan juga data berkenaan dengan kepemimpinan dari pihak Kepala Sekolah dan kerjasama dengan pihak Industri dan Dunia Kerja (IDUKA) yang berlangsung pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Kota Bogor. Secara khusus, tujuan dari pelaksanaan penelitian ini ialah sebagaimana di bawah ini:

1. Terdeskripsikannya pelaksanaan kepemimpinan kepala sekolah dalam menciptakan kemitraan dengan Industri dan Dunia Kerja (IDUKA) yang berlandaskan kebijakan merdeka belajar di SMKN Kota Bogor, meliputi:
 - a. Kepala sekolah dalam membuat perencanaan kemitraan dengan Industri dan Dunia Kerja (IDUKA) berlandaskan kebijakan merdeka belajar.
 - b. Kepala sekolah mengelola sumber daya manusia (SDM) dalam mendukung terciptanya kemitraan dengan Industri dan Dunia Kerja (IDUKA) berlandaskan kebijakan merdeka belajar.
 - c. Kepala sekolah membuat keputusan dalam menciptakan kemitraan dengan Industri dan Dunia Kerja (IDUKA) berlandaskan kebijakan merdeka belajar.
 - d. Kemampuan kepala sekolah dalam membangun kemitraan dengan Industri dan Dunia Kerja (IDUKA) berlandaskan kebijakan merdeka belajar.
2. Terdeskripsikannya kemitraan dengan Industri dan Dunia Kerja (IDUKA) berlandaskan kebijakan merdeka belajar yang dilakukan oleh kepala sekolah SMKN Kota Bogor, meliputi:
 - a. Bentuk program kemitraan dengan Industri dan Dunia Kerja (IDUKA) berlandaskan kebijakan merdeka belajar yang telah dilakukan di sekolah.
 - b. Proses pelaksanaan kemitraan dengan Industri dan Dunia Kerja (IDUKA) berlandaskan kebijakan merdeka belajar yang telah dilakukan di sekolah.

- c. Kesesuaian (relevansi) kemitraan dengan Industri dan Dunia Kerja (IDUKA) berlandaskan kebijakan merdeka belajar.
 - d. Faktor keberhasilan dalam menciptakan kemitraan dengan Industri dan Dunia Kerja (IDUKA) berlandaskan kebijakan merdeka belajar di sekolah.
3. Menghasilkan model kepemimpinan kepala sekolah dalam menciptakan kemitraan dengan Industri dan Dunia Kerja (IDUKA) berlandaskan kebijakan merdeka belajar di SMKN Kota Bogor.

1.4 Manfaat Penelitian

Merujuk pada hasil dari pengkajian konseptual dan juga pengamatan yang ada di lapangan, harapan dari peneliti ini bisa menyediakan sumbangan konstruktif dan juga kontribusi pada kajian berkenaan dengan kepemimpinan kepala sekolah, kemitraan Industri dan Dunia Kerja (IDUKA), dan merdeka belajar. Manfaat, baik dari segi praktis ataupun teori ialah sebagaimana di bawah ini:

a. Manfaat segi teori

Dari segi teori, penelitian ini dimaksudkan supaya mampu menyediakan sumbangsih dalam khazanah keilmuan administrasi pendidikan secara teori, terutama dalam rangka peranan kepemimpinan kepala sekolah, kemitraan Industri dan Dunia Kerja (IDUKA) dan merdeka belajar, khususnya pada lembaga yang bergerak dalam bidang jasa *nonprofit* (sekolah) guna mendukung organisasi sekolah jadi lembaga pebelejar yang dapat melaksanakan adaptasi terhadap perubahan lingkungan dan juga arus globalisasi.

b. Manfaat praktis

Sedangkan dari segi praktis, hasil dari pelaksanaan penelitian ini diharapkan agar mampu:

- 1) Agar jadi salah satu dari beberapa rujukan dan juga acuan untuk kepemimpinan dari kepala sekolah dalam melaksanakan pengelolaan sekolah dan memberikan gambaran untuk menjalin hubungan serta kemitraan dengan Industri dan Dunia Kerja (IDUKA).
- 2) Untuk pihak Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), hasil dari pelaksanaan penelitian ini dimaksudkan agar jadi sumber rujukan dan juga informasi dalam melaksanakan pengembangan kemitraan dengan Industri dan Dunia Kerja (IDUKA).

1.5 Struktur Organisasi Disertasi

Disertasi ini tersusun atas lima bab.

Bab pertama (Bab I) ialah berkenaan dengan bab pendahuluan, pada pendahuluan ini diuraikanlah latar belakang dari pelaksanaan penelitian yang dilaksanakan, struktur organisasi, manfaat penelitian, tujuan penelitian, rumusan masalah penelitian, dan juga fokus masalah.

Bab kedua (Bab II) ialah berkenaan dengan landasan teori dan juga kajian pustaka, dalam bab ini diuraikanlah berkenaan dengan kajian teori yang menjelaskan konsep dari teori yang memiliki keterkaitan hubungan dengan merdeka belajar, kepemimpinan kepala sekolah, dan juga berkenaan dengan kemitraan. Konsep-konsep teori memiliki keterkaitan hubungan guna menyelesaikan permasalahan yang terdapat pada bab pertama.

Bab ketiga (Bab III) ialah berkenaan dengan metode dari penelitian yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan yang terdapat pada bab yang pertama, yang berkenaan dengan analisis data, pengumpulan data, lokasi penelitian, partisipan, desain penelitian, dan juga pendekatan penelitian.

Bab keempat (Bab IV) ialah berkenaan dengan pembahasan dan juga temuan penelitian, dalam bab ini digambarkanlah hasil dari pelaksanaan penelitian dan juga pembahasan yang berdasarkan pada temuan yang terjadi di lapangan dan dilaksanakan pembahasan berdasarkan pada konsep-konsep teori yang tersedia pada bab kedua.

Bab kelima (Bab V) ialah bab paling akhir, yakni bab kesimpulan, implikasi, dan juga saran. Bab V ini menampilkan kesimpulan yang berdasarkan pada hasil dari pembahasan dari bab empat, implikasi dan juga saran yang bisa dihasilkan peneliti untuk institusi ataupun lembaga secara khusus dan umum.